

# Greenomics: Grup Cargill buka hutan secara ilegal

OLE ERWIN TAMBUNAN

*Bisnis Indonesia*

JAKARTA: Greenomics Indonesia mengungkapkan anak perusahaan Cargill yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit, yakni PT Hindoli, telah membuka hutan secara ilegal. Tudingan itu didasarkan pada laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Jadi tidak sepatutnya jika Greenpeace Indonesia mengajak Cargill untuk memboikot produk sawit SMART," ujar Direktur Eksekutif Greenomics Indonesia, Elfian Effendi, kemarin.

Elfian menjelaskan berdasarkan laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tertanggal 15 Januari 2010, terungkap bahwa satu perusahaan milik Cargill yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit—bernama PT Hindoli—dinyatakan telah melakukan pembukaan kawasan hutan secara ilegal di Provinsi Sumatra Selatan

seluas 1.976 hektare (ha), atau hampir setara 2.000 lapangan sepak bola.

Berdasarkan kalkulasi BPK, katanya, pembukaan kawasan hutan yang dilakukan secara ilegal oleh perusahaan milik Cargill itu, telah melenyapkan kayu hutan alam dengan volume seluas 23.265,13 m<sup>3</sup>, dan perusahaan itu harus membayar ganti rugi tegakan (GRT) sebesar Rp4.251.537.840.

Menurut BPK, perusahaan Cargill itu telah menyebabkan timbulnya kerugian negara sekitar Rp5.217.796.440 dan US\$289.907,72.

Menurutnya, bukan hanya harus membayar ganti rugi tegakan, anak perusahaan Cargill itu juga diwajibkan membayar provisi sumber daya hutan (PSDH) sebesar Rp 966.258.600 dan dana reboisasi (DR) US\$289.907,72.

"Perambahan kawasan hutan oleh perusahaan Cargill itu, telah melanggar Pasal 50 Undang-Un-

dang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Ancamannya adalah penjara paling lama 10 tahun dan membayar denda serta membayar ganti rugi sesuai tingkat kerusakan yang ditimbulkannya," ungkapnya.

Dalam situs resmi Cargill, disebutkan bahwa Cargill bekerja sama dengan organisasi lingkungan yang cukup terpercaya, yakni World Wide Fund for Nature (WWF) dan Flora and Fauna International (FFI), untuk membantu perusahaan itu dalam mendukung pembangunan kebun sawit secara berkelanjutan di Indonesia.

"WWF dan FFI perlu mempelajari laporan BPK tersebut karena Cargill terus memampangkan kerja sama dengan kedua LSM asing tersebut sebagai mitra kerjasama mereka untuk urusan lingkungan," saran Elfian.

Pembukaan kawasan hutan secara ilegal yang dilakukan oleh

perusahaan Cargill itu, lanjut Elfian, menunjukkan bahwa perusahaan hutan di Indonesia juga dilakukan oleh perusahaan-perusahaan asing, bahkan melalui praktik ilegal.

"Ajakan Greenpeace agar Cargill ikut memboikot produk SMART, seolah-olah Cargill diperingatkan agar jangan ikut andil dalam perusakan hutan dan lahan gambut di Indonesia. Padahal, Cargill sendiri adalah pelaku pembukaan kawasan hutan secara ilegal di Indonesia. Seharusnya, produk Cargill dapat dikampanyekan juga untuk diboikot, tanpa harus menunggu apakah Cargill mau memboikot produk SMART atau tidak," tutup Elfian.

Greenpeace, lanjutnya, perlu melihat fakta ini sebelum mengajak perusahaan agribisnis raksasa Amerika Serikat tersebut untuk memboikot produk SMART, perusahaan sawit di bawah grup bisnis Sinar Mas.